

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**

2025

Jl. Soekarno-Hatta No. 50

Telp. 031-3095331

BANGKALAN 69116

Web : www.dispendukcapilbkl.com

eMail : dispendukcapil@bangkalankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331
B A N G K A L A N

Kode Pos 69116

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN
188.45/ 14 /433.109/2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Renstra 2025-2029 dan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2044;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 20 Juni 2025

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**



ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan acuan perencanaan PD selama satu Tahun dan merupakan penjabaran per Tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan factor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 20 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN



ZAKARIYA, SH., MM
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I Pendahuluan.....	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Landasan Hukum.....	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
Bab II `Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025.....	
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2025	
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah.....	
3.2 Matrik Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah	
3.3 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	
Bab IV Penutup	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ini kemudian dijabarkan menjadi rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk dijadikan pedoman dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan bagian terintegrasi dari pemerintah daerah juga wajib untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan. Renja PD digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dimana telah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sehingga

perlunya penyesuaian visi, misi dan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta mensinergikan Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya ke dalam dokumen ini. Sehubungan juga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Pj. Bupati Bangkalan Nomor 900.1.1.4/1661/433.204/2025 yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2025 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 yang kemudian juga akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 35/E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2044;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2025 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja 2025 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta evaluasi kinerja di tahun 2024 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2025-2029 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2025 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2025,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.2.

3.3. Matrik Rancangan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja PD tahun 2025	Tingkat		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah				-				
2.12.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-				
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok	3	3	0	-	3	6	3
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	1	1	0	-	1	2	1
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dok	1	1	0	-	1	2	1
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dok	1	1	0	-	1	2	1
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Dok	8	8	0	-	12	20	10
2.12.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	-	-		-	-

2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	46	46	39	84,7826087	50	135	67,5
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	1	1	0	-	1	2	1
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	90 Lap	18	18	6	33,33333333	66	90	45
2.12.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	-	-	-	-	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	210 Lap	42	42	0	-	6	48	24
2.12.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	-	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2	2	0	-	1	3	1,5
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5	5	0	-	2	7	3,5
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2	2	0	-	3	5	2,5
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2	2	0	-	1	3	1,5
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Lap	38	38	3	7,894736842	44	85	42,5
2.12.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	-	-	-	-	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10	10	0	-	5	15	7,5
2.12.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	-	-	-	-	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Lap	2	2	0	-	1	3	1,5

2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	12	12	3	25	3	18	9
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	12	12	3	25	5	20	10
2.12.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	18	18	0	-	13	31	15,5
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	29	29	0	-	19	48	24
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	2	2	0	-	1	3	1,5
2.12.02	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El	95,50%	95,50%	95,50%	-	-	-	-	-
		Persentase kepemilikan KIA	63%	63%	63%	-	-	-	-	-
2.12.02.2.01	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	5 Dok	1	1	0	-	0	1	0,5
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	25 Dok	5	5	1	20	0	6	3
2.12.02.2.02	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	20 Dok	4	4	0	-	3	7	3,5

2.12.02.2.03	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	20 Keg	4 Keg	4 Keg	-	-	-	-	
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	90 Orang	18	18	0	-	0	18	9
	Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	3 Lap	-	-	0	-	-	-	
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	3 Lap	-	-	0	-	-	-	
									0	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	97,25%	97,25%	97,25%	-	-	-	-	
		Persentase penerbitan akte perkawinan	100%	100%	100%	-	-	-	-	
		Persentase penerbitan akte perceraian	100%	100%	100%	-	-	-	-	
		Persentase penerbitan akte kematian	100%	100%	100%	-	-	-	-	
2.12.03.2.01	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	-	-	-	-	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Dok	1	1	0	-	0	1	0,5
2.12.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	4 Keg	-	-	-	-	-	-	
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				0	-	0	0	0

	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / Kota	2 Lap	-	-	0	-	-	-	-
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	2 Lap	-	-	0	-	-	-	-
2.12.03.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	0	-	-
2.12.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan				0	-	24	24	12
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	5 Lap	1	1	0	-		1	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	-	-		-	
2.12.04.2.01	Keg. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	100%	100%	100%	-	-		-	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dok	5	5	1	20	0	6	3
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				0	-	0	0	0
2.12.04.2.02	Keg. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	5 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-		-	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	5 Dok	1	1	1	100	0	2	1

2.12.04.2.03	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	100%	100%	100%	-	-		-	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 Lap	18	18	0	-	10	28	14
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 Dok	1	1	0	-	0	1	0,5
2.12.04.2.04	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Keg	-	-	-	-		-	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Lap	-	-	0	-	33	-	-
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	-	-		-	
2.12.05.2.01	Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	-		-	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	5 Dok	1	1	0	-	321	322	161

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini Tabel mengenai Evaluasi Pelaksanaan Indikator SPM/NSPK/IKK/IKD sampai dengan Semester 1 Tahun 2025 :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah			
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	2.897.219	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.200.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.169.900	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1.500.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	1.300.000	

						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang	4.363.941.019	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	2.630.700	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 lap	5.683.400	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 lap	733.650	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.345.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.510.200	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	802.950	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.439.388	

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Lap	63.723.000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	3.868.100	
						Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
						Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	3.810.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	128.454.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	815.160.000	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	112.565.985	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	8.065.000	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180.000.000	

					Program Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan KTP El			
							Persentase kepemilikan KIA			
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk			
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	1 dok	14.364.650	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dok	742.528.250	
					Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak			
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Dok	25.802.500	
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang diselenggarakan			
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18 Org	43.991.000	
					Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	-		
					Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	-		

						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	-		
						Program Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan akte kelahiran			
							Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte perkawinan			
							Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte perceraian			
							Kab. Bangkalan	Persentase penerbitan akte kematian			
						Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan			
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 dok	96.467.901	
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan			
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	-		

						Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	Kab. Bangkalan	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / Kota	-		
						Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	-		
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-	2.213.601	
						Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 lap		
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan			
						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan			
						Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dok	17.625.500	
						Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-	24.026.250	
						Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola			

						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dok	8.733.750	
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung			
						Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 lap	15.200.000	
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	-		
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 lap	4.075.250	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan			
						Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun			
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Bangkalan	Jumlah Buku Profil yang diadakan	1 dok	13.490.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, prioritas daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai prioritas pembangunan nasional yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. Prioritas Provinsi yaitu “Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi. Prioritas Kabupaten “Memperkuat penyelenggaraan birokrasi yang berkualitas, inovatif, melayani, transparan dan anti korupsi, serta memperkuat terwujudnya kehidupan masyarakat yang religious, harmonis dan anti narkoba melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, memperkokoh ideology Pancasila dan demokrasi.

3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja tahun 2025 Perangkat Daerah

Sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan Tahun 2025 adalah :

a. Tujuan :

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

b. Sasaran :

“Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan						Sasaran					
Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target			Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target		
			Renja 2025	P-Renja 2025	Renja 2026				Renja 2025	P-Renja 2025	Renja 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	89,79	92			Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	71,1	74,9		
							Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98,3	99,7		
							Persentase pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan	100	100		
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Indek Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	85,46	86		
							Nilai SAKIP	63,05	61.5		
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan			92	92,5	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			74,9	75
							Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			99,7	99,8
							Persentase pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan			100	100
						Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Indek Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan			86	87
							Nilai SAKIP			61.5	62

Tabel 3.2
Matrik Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Persentase kepemilikan KIA	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
			Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	
			Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Persentase penerbitan akte perkawinan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
		Persentase penerbitan akte perceraian		
		Persentase penerbitan akte kematian	Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	
			Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	

Tabel 3.3
Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025				Perubahan Renja Tahun 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	14
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah				Indeks kepuasan layanan penunjang pemerintahan daerah				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	2.897.219	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	130.100	DAU	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.200.000	DAU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	65.050	DAU	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.169.900	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	65.050	DAU	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1.500.000	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	65.050	DAU	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	1.300.000	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	130.100	DAU	

2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang	4.363.941.019	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang	4.018.462.898	DAU	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	2.630.700	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	191.700	DAU	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 lap	5.683.400	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 lap	3.921.150	DAU	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun				
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 lap	733.650	DAU	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 lap	65.050	DAU	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.345.000	DAU	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	304.300	DAU	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	235.510.200	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6.077.517	DAU	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	802.950	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.439.388	DAU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-		
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Lap	63.723.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Lap	10.008.000	DAU	

2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana				
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	3.868.100	DAU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	3.810.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	3.210.000	DAU	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	128.454.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	128.454.000	DAU	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	815.160.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	727.075.000	DAU	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana				
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	112.565.985	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	35.977.177	DAU	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	8.065.000	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-		
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	180.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.000.000	DAU	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP El				Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk				
		Persentase kepemilikan KIA								
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk				Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk				

2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dok	14.364.650	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dok	3.128.550	DAU	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dok	742.528.250	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dok	13.878.000	DAU	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak				Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak				
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Dok	25.802.500	DAU	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	-		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan				Jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan				
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18 Org	43.991.000	DAU	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18 Org	5.000.000	DAU	
	Koordinator antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		-				-			
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		-				-			
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran				Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte				
		Persentase penerbitan akte perkawinan								
		Persentase penerbitan akte perceraian								
		Persentase penerbitan akte kematian								
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan				Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan				

2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok	96.467.901	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok	6.426.300	DAU	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan				Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan				
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	-			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	-	-		
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota	Jumlah hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/ kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada instansi vertikal dan UPT dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten / Kota	-				-			
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	-				-			
2.12.03.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
2.12.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	-			
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	1 Lap	2.213.601	DAU		1 Lap	1.133.572.350	DAU Earmarked	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan				Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan				Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan				
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dok	17.625.500	DAU	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dok	6.293.500	DAU	

2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah	1 Lap	24.026.250	DAU	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah	1 Lap	130.100	DAU	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola				Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola				
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dok	8.733.750	DAU	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dok	130.100	DAU	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung				Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung				
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Lap	15.200.000	DAU	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Lap	3.694.450	DAU	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	-				-			
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan DataKependudukan	1 lap	4.075.250	DAU	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan DataKependudukan	-	-		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan				Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan				
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun				Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun				
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diadakan	1 dok	13.490.000	DAU	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan danProyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dok	4.999.900	DAU	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance*.

Rencana program dan kegiatan serta lokasi pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2025. Begitu pula dengan total pagu program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2024.

Pencantuman Indikator serta Target Kinerja pada Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah konsisten dengan RKPD Tahun 2025.

Program dan Kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diharapkan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk memaksimalkan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan baik dari segi pemberi layanan (administrasi dan teknis) serta penerima layanan yaitu masyarakat Bangkalan. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana pendukung Administrasi Kependudukan yang memadai.

